

Fenomena Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) Pada Siswa Sekolah Dalam Perspektif Muhammad Abduh

Fitriah^{1*}, Iqbal Maulana², Lulu Nurul Khasanah³, Andi Rosa⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Ushuluddin Dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jl. Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug, Serang Banten, Indonesia, Serang Banten, Indonesia

E-mail: 231320033.lulunurul@uinbanten.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4189>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Dec 2025

Revised: 16 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Makanan Bergizi Gratis (MBG), Keracunan Pangan, Muhammad Abduh, Reformasi Sosial dan Pendidikan, Masalah dan Akuntabilitas Publik.

Keywords:

Free Nutritious Food (MBG), Food Poisoning, Muhammad Abduh, Social Reform and Education, Masalah and Public Accountability.

ABSTRACT

Fenomena keracunan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah siswa sekolah di Indonesia menimbulkan diskursus kritis mengenai tata kelola pendidikan, kesehatan publik, dan etika sosial dalam penyelenggaraan program pemerintah. Insiden keracunan yang seharusnya tidak terjadi ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, implementasi kebijakan, dan kualitas pangan yang disediakan. Untuk mendalami persoalan ini, perspektif pembaruan pemikiran Islam dari Muhammad Abduh dapat memberikan kerangka analisis yang relevan, terutama terkait tanggung jawab moral, rasionalitas, dan reformasi sosial. Abduh, sebagai tokoh modernis Islam, menekankan pentingnya penggunaan akal sehat (*al-'aql*), etika kemasyarakatan, dan reformasi pendidikan sebagai fondasi pembentukan masyarakat beradab. Dalam konteks fenomena keracunan MBG, pemikiran Abduh menuntut adanya integrasi antara rasionalitas dan nilai-nilai moral dalam setiap kebijakan publik. Ia berpendapat bahwa umat dan pemerintah tidak boleh terjebak pada pola kerja formalitas tanpa memastikan manfaat substantif bagi masyarakat. Program MBG, meskipun memiliki niat baik untuk meningkatkan status gizi dan kesiapan belajar siswa, menjadi kontraproduktif ketika proses pengadaan, distribusi, dan pengawasan tidak berbasis ilmu pengetahuan, transparansi, dan akuntabilitas.

*The phenomenon of poisoning in the Free Nutritious Food (MBG) program experienced by a number of school students in Indonesia has caused a critical discourse on educational governance, public health, and social ethics in the implementation of government programs. This poisoning incident that should not have occurred is an indicator of weaknesses in the surveillance system, policy implementation, and quality of food provided. To delve into this issue, the perspective of the renewal of Islamic thought from Muhammad Abduh can provide a relevant framework of analysis, especially related to moral responsibility, rationality, and social reform. Abduh, as an Islamic modernist figure, emphasized the importance of the use of common sense (*al-'aql*), social ethics, and educational reform as the foundation for the formation of a civilized society. In the context of the phenomenon of MBG poisoning, Abduh's thinking demands an integration between rationality and moral values in every public policy. He argued that the ummah and the government should not be trapped in a formalistic work pattern without ensuring substantive benefits for society. MBG programs, while well-intentioned to improve students' nutritional status and learning readiness, become counterproductive when the procurement, distribution, and oversight processes are not based on science, transparency, and accountability.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Fitriah, et al (2025). Fenomena Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) Pada Siswa Sekolah Dalam Perspektif Muhammad Abduh, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4189>

PENDAHULUAN

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini secara khusus ditujukan kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan perhatian, yaitu anak-anak usia dini, ibu hamil, serta para siswa sekolah. Ketiga kelompok ini dipilih karena berada pada fase perkembangan yang sangat penting dan rentan terhadap risiko kekurangan gizi (Pratiwi, 2025). Program ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan anak sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan asupan bergizi yang memadai. Namun, dalam implementasinya muncul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang menimbulkan kekhawatiran publik terhadap mutu dan keamanan pangan yang disalurkan melalui program tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Laporan awal tahun menunjukkan setidaknya lima insiden keracunan terkait distribusi MBG di sekolah-sekolah negeri. Masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh ranah moral dan tanggung jawab sosial penyelenggara program (Felix et al., 2025).

Keracunan MBG di kalangan siswa bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga indikator lemahnya tata kelola dan pengawasan kebijakan publik. Evaluasi terhadap program gizi serupa di Indonesia menunjukkan adanya *policy implementation gap* yang disebabkan oleh koordinasi lintas lembaga yang tidak efektif, lemahnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, niat baik kebijakan publik sering kali tidak berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan. Dalam konteks keislaman, kegagalan implementasi kebijakan yang mengandung unsur kemaslahatan publik semestinya menjadi perhatian serius, karena ia berkaitan langsung dengan prinsip amanah (kejujuran dan tanggung jawab) serta maslahah (kebaikan umum). Fenomena ini membuka ruang bagi analisis nilai-nilai moral Islam dalam praktik kebijakan publik kontemporer (Suprpto et al., 2025).

Dalam sejarah pemikiran Islam modern, Muhammad Abduh (1849–1905) dikenal sebagai tokoh pembaharu yang menekankan pentingnya rasionalitas, moralitas, dan kemaslahatan sosial. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam harus mampu menjawab persoalan masyarakat modern melalui *ijtihad* dan akal sehat, bukan sekadar taklid terhadap tradisi lama. Pandangan ini menjadikan Abduh relevan untuk dikontekstualisasikan dalam fenomena kebijakan publik seperti program MBG. Nilai-nilai etika sosial yang digagasnya dapat menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dijalankan dengan prinsip tanggung jawab moral dan kemaslahatan umat. Melalui pendekatan tafsir sosial (*adabi ijtima'i*), pemikiran Abduh dapat memberikan landasan konseptual untuk mengkaji relasi antara agama dan kebijakan public (Mulfi, 2021).

Dari tinjauan pustaka, hal yang telah diketahui ialah keberadaan program MBG dan dampak sosialnya yang signifikan terhadap siswa serta keberadaan literatur yang membahas pemikiran rasional-sosial Muhammad Abduh. Namun, yang masih belum terungkap (*unknown*) ialah keterkaitan langsung antara pemikiran Abduh dan analisis fenomena sosial seperti keracunan MBG. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: menghubungkan teori pembaruan Islam rasional dengan studi kebijakan publik kontemporer, khususnya dalam konteks keamanan pangan sekolah. Pendekatan ini membuka ruang bagi tafsir sosial-keagamaan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga praktis dan responsif terhadap problem masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pemikiran sosial-keagamaan Muhammad Abduh terhadap fenomena keracunan MBG pada siswa sekolah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menelaah konsep rasionalitas, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan sosial yang dikembangkan oleh Abduh untuk menilai kebijakan publik berbasis kesejahteraan. Dengan metode tafsir sosial (*adabi ijtima'i*), studi ini mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan halal, aman, dan baik (*thayyib*) serta implikasinya terhadap etika pengelolaan kebijakan publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur keislaman kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan berbasis nilai Islam rasional dan humanistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan corak tafsir sosial (*adabi ijtima'i*) yang berfokus pada pemahaman makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks fenomena sosial modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan realitas sosial dalam hal ini kasus

keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah melalui kerangka pemikiran Muhammad Abduh yang menekankan rasionalitas, moralitas, dan kemaslahatan umat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan data primer berupa Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, serta karya Abduh lainnya. Data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, berita resmi pemerintah, serta penelitian kebijakan publik terkait program gizi sekolah. Semua sumber dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika sosial untuk menemukan relevansi antara tafsir Abduh dan fenomena kebijakan publik. Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu analisis isi (content analysis) dan hermeneutika kontekstual. Analisis isi digunakan untuk menelusuri pesan moral dan sosial yang terkandung dalam tafsir Abduh, sedangkan hermeneutika kontekstual digunakan untuk menghubungkan pesan tersebut dengan situasi aktual masyarakat, seperti lemahnya tanggung jawab moral dalam implementasi kebijakan publik. Validitas penelitian dijaga melalui proses triangulasi sumber dan kajian silang terhadap teks tafsir serta data empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Abduh

Muhammad Abduh (1849–1905) adalah sosok sentral dalam sejarah pembaruan Islam modern. Ia lahir di Mahallat al-Nasr, Mesir, dari keluarga sederhana berdarah Arab dan Turki. Kondisi Mesir pada masa itu tengah dilanda ketidakstabilan sosial dan tekanan ekonomi akibat kebijakan kolonial dan pajak yang memberatkan rakyat. Situasi inilah yang membentuk karakter Abduh sebagai intelektual yang peka terhadap penderitaan masyarakat dan berkomitmen terhadap reformasi sosial. Ia menolak kejumudan berpikir yang mengekang umat Islam untuk maju. Dalam pandangannya, kemunduran Islam bukan karena ajarannya, melainkan akibat ketertinggalan umat dalam memahami spirit rasionalitas yang terkandung dalam wahyu (Usman, 2021).

Sejak muda, Abduh menempuh pendidikan agama tradisional di al-Azhar, di mana ia mempelajari tafsir, fikih, filsafat, dan logika. Meski berakar kuat pada ilmu klasik, ia mulai merasa perlu adanya pembaruan sistem pendidikan Islam agar lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Perjumpaannya dengan Jamaluddin al-Afghani menjadi titik balik yang memperkuat arah reformisnya. Bersama gurunya itu, Abduh terlibat dalam gerakan politik dan intelektual yang menentang kolonialisme serta mendorong kesadaran umat terhadap pentingnya persatuan Islam. Peran Abduh sebagai editor dan pengajar menjadikannya jembatan antara gagasan reformasi dan masyarakat umum, terutama dalam mengembangkan pemikiran Islam rasional (Rohman, 2016).

Karya monumental Abduh, Tafsir al-Manar, yang ia susun bersama Rasyid Ridha, menjadi bukti nyata dari pendekatan tafsir rasionalnya. Dalam menafsirkan al-Qur'an, ia menolak taqlid buta dan mengajak umat Islam memahami teks wahyu melalui pemikiran kritis dan kontekstual. Abduh menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan relevan sepanjang masa, termasuk dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Metodenya menyeimbangkan antara tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan bi al-ra'yi (berdasarkan akal), menunjukkan bahwa wahyu dan rasio bukanlah dua hal yang bertentangan.

Selain bidang tafsir, Abduh juga berjuang keras memperbaharui sistem sosial dan pendidikan di Mesir. Ia mendorong agar pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang dapat memperkuat umat menghadapi modernitas. Pandangannya menempatkan pendidikan sebagai kunci pembebasan umat dari kebodohan dan ketertinggalan. Abduh menginginkan lahirnya generasi Muslim yang berakhlak, berakal kritis, dan terbuka terhadap kemajuan. Ia juga mengupayakan reformasi lembaga keagamaan agar lebih responsif terhadap isu-isu kemasyarakatan.

Pemikiran Abduh memiliki pengaruh luas tidak hanya di Mesir, tetapi juga di dunia Islam, termasuk Indonesia. Gagasannya tentang harmonisasi agama dan akal menginspirasi lahirnya gerakan pembaruan seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Ia juga dikenal melalui kiprahnya di organisasi al-'Urwat al-Wutsqa bersama al-Afghani, yang berupaya menyatukan umat Islam melawan kolonialisme dan disintegrasi internal. Meskipun gerakan itu tidak bertahan lama, idealisme dan visi intelektualnya tetap hidup dalam diskursus keislaman kontemporer. Abduh meninggal pada tahun 1905, namun gagasan-gagasannya tentang rasionalitas, pendidikan, dan kemajuan umat terus menjadi rujukan utama dalam studi Islam modern. (Pemikiran et al., 2017)

Metode Pemikiran Muhammad Abduh

Filsafat Wujud dalam Pandangan Keagamaan Muhammad Abduh

Dalam kerangka pemikirannya, Muhammad Abduh menempatkan filsafat wujud sebagai fondasi bagi pemahaman metafisika Islam. Ia berkeyakinan bahwa seluruh eksistensi di alam semesta hanyalah bentuk manifestasi dari wujud Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan, menurut Abduh, merupakan wajib al-wujud zat yang keberadaannya mutlak dan menjadi sumber segala realitas. Sementara itu, makhluk hanya memiliki keberadaan yang bersifat relatif dan bergantung kepada-Nya. Dengan pendekatan tersebut, Abduh berusaha menunjukkan bahwa antara Tuhan dan alam tidak ada sekat ontologis yang memisahkan, melainkan keterhubungan makna yang saling menegaskan. Filsafat wujud dalam pandangannya bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga jembatan yang mengaitkan spiritualitas dengan rasionalitas manusia, sehingga membuka ruang dialog antara iman dan filsafat modern (Novia Aini, 2023).

Akal sebagai Kunci Penafsiran dan Pemahaman Realitas

Bagi Abduh, akal merupakan instrumen ilahiah yang diberikan kepada manusia untuk menyingkap tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ia menolak pandangan yang menempatkan akal dan wahyu dalam posisi yang saling bertentangan. Justru keduanya saling melengkapi: akal menjadi alat untuk memahami dunia dan menafsirkan wahyu secara kritis, sedangkan wahyu memberi arah moral dan batas kebenaran yang tak bisa dijangkau oleh akal semata. Dalam konteks ini, Abduh meletakkan dasar bagi tafsir rasional modern yang menggabungkan metode analisis logis dengan kepekaan spiritual. Pandangan tersebut menjadikan akal bukan sekadar alat berpikir, tetapi sarana untuk memperdalam makna iman dalam kehidupan nyata (Rohman, 2016).

Wahyu sebagai Sumber Ilmu dan Etika Kehidupan

Abduh menegaskan bahwa wahyu merupakan sumber pengetahuan tertinggi dan pedoman moral yang mengatur kehidupan manusia secara utuh. Baginya, wahyu tidak boleh dipahami hanya sebagai teks yang dibaca, melainkan sebagai sistem nilai yang membimbing umat menuju kesempurnaan hidup. Wahyu melampaui batas logika manusia, namun tetap dapat dipahami melalui refleksi rasional yang sehat. Dalam pandangan Abduh, wahyu mengandung dimensi epistemologis dan etis sekaligus menuntun manusia untuk membangun kehidupan sosial yang berkeadilan, serta memperjelas arah kehidupan akhirat yang menjadi tujuan akhir. Karena itu, keseimbangan antara wahyu dan akal merupakan kunci bagi kebangkitan pemikiran Islam di era modern (Amir, 2021).

Teologi Rasional sebagai Landasan Reformasi Keagamaan

Dalam bidang teologi, Abduh mengambil posisi yang dekat dengan rasionalisme Mu'tazilah, meski tidak sepenuhnya terikat oleh aliran tersebut. Ia menolak taklid dan dogma yang menghambat perkembangan pemikiran umat. Dengan menekankan kebebasan berpikir, ia mengajak umat Islam memahami ajaran agama melalui penalaran yang kritis. Menurut Abduh, penggunaan logika dalam memahami sifat-sifat Tuhan bukan bentuk penentangan terhadap iman, melainkan upaya untuk memperdalamnya. Pendekatan ini melahirkan teologi Islam yang lebih terbuka, adaptif terhadap ilmu pengetahuan, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat modern. Dengan cara itu, Abduh berhasil memadukan keyakinan spiritual dengan semangat rasionalitas (Rasam, 1996).

Ilmu Pengetahuan sebagai Pilar Kebangkitan Umat Islam

Abduh menilai bahwa kemajuan umat Islam sangat bergantung pada kemauan mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia berpandangan bahwa sains modern tidak bertentangan dengan Islam, sebab keduanya bersumber dari kebijaksanaan Tuhan yang sama. Oleh karena itu, ia mendorong agar lembaga pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia secara harmonis. Pendidikan ideal, menurutnya, adalah pendidikan yang menumbuhkan iman sekaligus kecerdasan intelektual. Pandangan ini menjadi dasar gerakan reformasi pendidikan Islam, di mana ilmu pengetahuan diposisikan sebagai instrumen peradaban, bukan ancaman bagi keyakinan. Melalui gagasan tersebut, Abduh menegaskan bahwa kemajuan spiritual dan ilmiah dapat berjalan beriringan (Pemikiran et al., 2017).

Metodologi pemikiran Muhammad Abduh bersifat integrative menggabungkan pendekatan rasional, historis, dan empiris dalam memahami teks keagamaan. Ia mendorong dialog dan perdebatan ilmiah sebagai sarana memperkaya pemikiran Islam. Gagasan-gagasannya tidak hanya terbatas pada ranah teologis, tetapi juga meluas ke bidang sosial dan pendidikan. Abduh menanamkan kesadaran

bahwa Islam bukan sekadar sistem kepercayaan, melainkan kerangka hidup yang dinamis dan ilmiah. Pengaruhnya terasa hingga kini dalam reformasi pendidikan, pembaruan tafsir, dan modernisasi pemikiran Islam di dunia Muslim, termasuk di Indonesia. Ia meninggalkan warisan intelektual yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara wahyu, rasio, dan pengalaman empiris dalam memahami agama.

Analisis Kasus Keracunan MBG dalam Perspektif Muhammad Abduh

Sejak peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025, keracunan makanan menjadi isu serius yang merebak di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen keamanan pangan dan pengawasan pemerintah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga September 2025 terdapat 5.914 orang yang dilaporkan mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG (Pakpahan, 2025). Data ini menunjukkan bahwa problem keamanan pangan dalam program ini tidak bisa dianggap ringan, terlebih karena target penerima manfaat sangat besar (Com, n.d.).

Dalam pemikiran Muhammad Abduh, pemerintah idealnya berfungsi sebagai wakil umat yang bertugas memastikan kemaslahatan publik (masalah ‘ammah). Kasus keracunan makanan pada anak-anak merupakan kelompok yang seharusnya dilindungi, berikut menunjukkan bahwa aspek masalah belum tercapai. Bagi Abduh, kemaslahatan tidak hanya berupa program besar dan ambisius, tetapi juga kualitas implementasi yang memastikan tidak adanya kemudharatan (darar). Dengan kata lain, program MBG telah mengalami mufsidah (kerusakan) ketika pengawasan dan SOP yang lemah berdampak pada kesehatan siswa.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga menyatakan bahwa terdapat 17 kejadian luar biasa (KLB) terkait keracunan MBG di 10 provinsi selama periode Januari hingga Mei 2025 (Rahmawati, 2025). Insiden-insiden ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia makanan (SPPG) terutama dapur yang baru berdiri serta SOP (Standar Operasional Prosedur) yang belum dipatuhi secara konsisten.

Analisis terhadap penyebab keracunan menunjukkan beberapa masalah mendasar. Menurut laporan BGN, bakteri *E. coli* teridentifikasi sebagai penyebab utama, terutama berasal dari sumber seperti air, nasi, tahu, dan ayam (Pakpahan, 2025). Selain itu, ada juga indikasi permasalahan dalam manajemen distribusi makanan, demikian di nilai bahwa kegagalan ini terjadi karena keputusan politik lebih dominan dibanding perencanaan teknis yang berbasis data ilmiah. Misalnya, banyak dapur SPPG yang belum memenuhi standar higienitas tetapi tetap dioperasikan atau makanan yang diangkut dalam kondisi yang tidak aman, penyimpanan yang tidak memadai, dan keterlambatan distribusi (Hendarto, 2025).

Distribusi geografis kasus keracunan MBG cukup luas. Menurut Merdeka, dari total 70 insiden keamanan pangan (keracunan termasuk di dalamnya) sampai September 2025, sebanyak 41 kejadian terjadi di Pulau Jawa dengan sekitar 3.610 korban (Merdeka.com, n.d.). Ada juga kejadian di Sumatra (9 insiden, 1.307 korban) dan di kawasan lain seperti Kalimantan, Sulawesi, serta wilayah luar Jawa. Dalam skala nasional, pengawasan SOP oleh otoritas lokal juga dikritik misalnya Ombudsman Banten mengawasi pelaksanaan SOP MBG di sekolah menyusul kasus keracunan di SMP Negeri 1 Kramatwatu, Kabupaten Serang (Indonesia, 2025).

Di sisi lembaga pengawas dan advokasi, lembaga seperti CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives) meminta evaluasi menyeluruh hingga moratorium sementara program MBG (Secretariat, 2025). CISDI menilai bahwa ambisi target penerima MBG (82,9 juta orang) dijalankan terlalu cepat tanpa kesiapan manajemen distribusi dan kualitas dapur yang matang (Secretariat, 2025). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menyatakan bahwa “*kasus keracunan MBG tak bisa ditolerir*” dan mendesak penghentian sementara program sampai pengawasan diperkuat (Fajarihza, 2025).

Pemerintah sendiri mengakui masalah tersebut dan menyatakan komitmen untuk perbaikan. Abduh juga sering menyoroti perlunya pembaruan administrasi publik (islah al-idarah) agar pemerintahan tidak dijalankan secara asal-asalan. Ia mengkritik keras sikap lalai, tidak kompeten, dan birokrasi yang hanya mengejar proyek tanpa memperhatikan kualitas. Kasus MBG tahun 2025 mencerminkan apa yang dikritik Abduh. Diantaraya, prosedur tidak ketat, pengawasan minim, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun penyedia makanan. Dalam kerangka pemikirannya, solusi harus dimulai dari pembenahan sistem, bukan sekadar menyalahkan pelaksana di lapangan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pemerintah akan mengevaluasi insiden keracunan meskipun menurut mereka persentase kasus dibanding jumlah porsi yang disalurkan “sangat kecil” (Fajarizha, 2025). Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut target “zero error” dalam pelaksanaan program MBG, walaupun dia mengakui bahwa beberapa dapur masih belum sempurna dalam sistem operasional (Anisah, 2025). Evaluasi akademis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam manajemen risiko keamanan pangan (food safety risk management) sangat kentara. Permasalahan SOP dapur, kurangnya pengalaman pengelola dapur massal (SPPG), dan distribusi yang kurang higienis menjadi titik lemah utama. Belum lagi, kapasitas laboratorium lokal dan sistem pelaporan insiden keracunan perlu diperkuat agar data bisa lebih cepat ditindaklanjuti dan transparan.

Sebagai rekomendasi, dari analisis ini ada beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Penguatan SOP dan sertifikasi dapur: Setiap SPPG harus memenuhi standar higienis dan sanitasi yang ketat sebelum diizinkan menjalankan program MBG.
2. Pelatihan food safety: Staf dapur, pengantar makanan, dan pengelola MBG harus mendapatkan pelatihan tentang penanganan makanan, penyimpanan, dan distribusi agar risiko kontaminasi bisa ditekan.
3. Monitoring dan audit berkala: Pemerintah perlu mengadakan audit rutin terhadap dapur (SPPG) dan rantai distribusi makanan MBG, termasuk inspeksi tak terjadwal.
4. Sistem pelaporan publik: Membangun dashboard transparan yang memungkinkan publik melihat data keracunan, investigasi, dan tindakan korektif.
5. Kolaborasi antar lembaga: BGN, BPOM, Dinas Kesehatan, sekolah, dan masyarakat lokal harus bekerja sama dalam memastikan keamanan pangan di program MBG.

Secara keseluruhan, jika dilihat dari pandangan Muhammad Abduh, kasus keracunan MBG bukan hanya kegagalan teknis keamanan pangan, tetapi juga kegagalan moral, rasional, dan administratif. Pemerintah, dalam pemahaman Abduh, seharusnya tidak hanya fokus pada besarnya program, tetapi pada kualitas, pengawasan ilmiah, dan dampaknya bagi kemaslahatan masyarakat. Spirit tajdid (pembaruan) yang dibawa Abduh menuntut bahwa program sehebat MBG harus dijalankan dengan standar integritas dan rasionalitas yang tinggi agar benar-benar membawa kemajuan bagi bangsa.

Implikasi Pemikiran Muhammad Abduh Terhadap Kebijakan Publik Dan Pendidikan

Pemikiran Muhammad Abduh menandai bahwa yang terpenting dalam kebijakan publik dan pendidikan, khususnya dalam konteks revitalisasi sistem pendidikan. Menurut Abduh, upaya untuk membenahi pendidikan Islam tidak cukup hanya dengan mengembalikan sistem pembelajaran kepada bentuk aslinya di masa awal Islam. Lebih dari itu, sistem pendidikan harus diadaptasi secara kontekstual terhadap perkembangan dan tuntutan zaman modern, agar tetap relevan dan fungsional dalam menjawab persoalan umat secara komprehensif. Setidaknya terdapat empat gagasan utama dalam pemikiran Abduh yang hingga kini masih relevan dan dapat menjadi dasar penguatan manajemen pendidikan Islam di era kontemporer. (Adnan & Aziz, 2025)

Pertama, kritik terhadap sistem pendidikan dikotomis. Muhammad Abduh menolak paradigma pendidikan yang membatasi kewajiban belajar hanya pada studi keislaman klasik berbahasa Arab, khususnya yang berorientasi pada dogma-dogma kalamiyah. Menurutnya, kewajiban belajar mencakup pula penguasaan terhadap ilmu-ilmu modern, termasuk ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan pemikiran Barat. Tujuan dari pendekatan ini bukan untuk meniru secara buta, melainkan untuk memahami faktor-faktor kemajuannya yang telah dicapai peradaban Barat, agar umat Islam dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan kritis (Wiranata, 2019). Saat ini, semangat pembaruan tersebut tercermin dalam kebijakan integrasi kurikulum antara ilmu keislaman dan ilmu umum di berbagai lembaga pendidikan Islam.

Kedua, konsep sistem pendidikan Islam yang integral. Bagi Abduh, pendidikan ideal adalah pendidikan yang tidak hanya mengasah daya pikir rasional (akal), tetapi juga membina jiwa dan moralitas peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya mencetak individu yang sukses secara duniawi, tetapi juga mampu meraih kebahagiaan ukhrawi.

Ketiga, Abduh mengangkat pentingnya reformasi metode pengajaran. Ia mengkritik keras praktik pendidikan yang hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman. Baginya, metode seperti itu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga kontraproduktif terhadap perkembangan nalar peserta didik.

Abduh sendiri menunjukkan preferensinya terhadap metode diskusi dan analisis dalam pengajarannya di Al-Azhar (Afkar & Resky, 2024).

Keempat, gagasan Abduh mengenai manajemen kesejahteraan tenaga pendidik melalui sistem pengajaran guru yang layak dan berkelanjutan juga menjadi terobosan penting dalam manajemen pendidikan. Ia memahami bahwa semangat pengabdian guru tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan hidup dasar mereka. Meski usulan ini sempat mendapat resistensi dari sebagian kalangan ulama yang khawatir akan menurunkan semangat keikhlasan, Abduh menegaskan bahwa kesejahteraan material adalah prasyarat untuk menciptakan kualitas pengajaran yang optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Fenomena keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa sekolah menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketika program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi justru menimbulkan risiko kesehatan, hal ini mengindikasikan kegagalan integrasi antara rasionalitas, etika, dan tata kelola yang baik. Melalui perspektif pemikiran Muhammad Abduh, persoalan ini dapat dipahami sebagai akibat dari kurangnya penerapan prinsip masalah, amanah, dan pemanfaatan akal sesuai tuntunan Islam modernis. Abduh menekankan pentingnya reformasi sosial dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, moralitas, dan tanggung jawab publik. Dalam konteks MBG, pemikiran ini menegaskan bahwa kebijakan harus didasarkan pada standar ilmiah seperti higienitas pangan, kontrol kualitas, serta transparansi dalam distribusi dan pengadaan. Insiden keracunan menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut belum diimplementasikan secara optimal. Karena itu, penyelenggara program perlu melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki manajemen rantai pasok, meningkatkan pengawasan, dan memastikan semua pihak bekerja berdasarkan prinsip amanah dan akuntabilitas. Dengan demikian, perspektif Muhammad Abduh mengarahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari niat baik pemerintah, tetapi dari penerapan nilai-nilai rasional dan etis dalam praktiknya. Program MBG akan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa sekolah apabila dirancang dan dijalankan secara profesional, ilmiah, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Insiden keracunan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan struktural sehingga program pangan bergizi ini dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda, bukan menjadi ancaman bagi keselamatan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Adnan, I. M., & Aziz, F. F. (2025). *Sejarah Pemikiran Muhammad Abduh dan Kontribusinya dalam Pendidikan Islam*. 12(2), 67–78.
- Amir, A. N. (2021). Pemikiran Tafsir Shaykh Muhammad Abduh. *Ilmu Usuluddin*, 20(1), 30–40. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v>
- Anisah, L. (2025). *Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Prabowo Targetkan Zero Insiden*. Kontan.Co.Id.
- Com, R. B. (n.d.). *Keracunan Makanan MBG Ada 5.626 Orang, Cisdi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius*. Redaksi-Bisnis.Com.
- Fajarihza, R. F. (2025). *KPAI Tegaskan Keracunan MBG Tak Bisa Ditolerir Minta Dihentikan Sementara*. Bisnis Ekonomi.
- Felix, K., Emmanulle, V., Saputra, R. A., Sena, A., Yuda, P., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(04), 1329–1342.
- Hendarto, Y. M. (2025). *Urgency of Evaluation of the Implementation of the Free Nutritious Meal Program*. KOMPAS.Id.
- Indonesia, O. R. (2025). *Kasus keracunan makanan, ombudsman banten awasi sop progam mbg*.

- Ombudsman Republik Indonesia.
Merdeka.com. (n.d.). *70 kasus Keracunan Hantui Program Makan Bergizi Gratis, Prioritas Utama Keamanan Pangan MBG*. Merdeka.Com.
- Mulfi, H. (2021). Konsep Muhammad Abduh Tentang Islam Rasional Di Era Modern. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.11234>
- Novia Aini, T. (2023). PENGARUH IBN ‘ ARABĪ (1165 -1240 M) TERHADAP FILSAFAT WUJ Ū D MULL Ā Ş ADRĀ (1572 -1640 M). *Journal of Humanities Issue*, 1(1). <https://doi.org/DOI:hpttps://doi.org/00.00000/jhi.0000.0000>
- Pakpahan, R. (2025). *Korban Keracunan Program MBG Tembus 5.914 Orang per September 2025*. MONITOR INDONESIA.
- Pemikiran, S., Abduh, M., & Pengaruhnya, D. A. N. (2017). Studi pemikiran muhammad abduh dan pengaruhnya terhadap pendidikan di indonesia. *TARBAWI*, 3(01), 90–101.
- Pratiwi, C. E. (2025). *Saat Bantuan Menjadi Malapetaka: Analisis Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis dan Pertanggungjawaban Pihak yang Terlibat*. Researchgate.
- Rahmawati, D. (2025). *Kepala BPOM Beberkan Data 17 Kejadian Luar Biasa Keracunan MBG di 2025*. DetikNews.
- Rasam. (1996). *Muhammad abduh dan pemikiran-pemikirannya*. 145–155.
- Rohman, F. (2016). Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh. *Jurnal Raudhah*, 4(01), 90.
- Secretariat, C. (2025). *Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Mendesak Presiden Prabowo segera Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh Program MBG*. Cisdi.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *Menyimpulkan Bahwa Program Makan Siang Gratis Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial Yang Didukung Oleh Kerangka Hukum Kokoh Dan Partisipasi Masyarakat Aktif Agar Tujuan Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dapat Tercapai*. *This*, 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>
- Usman, A. M. (2021). Modernisasi Pendidikan Islam ; Telaah Pemikiran Muhammad Abduh Abdul Malik Usman Pendahuluan Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh merupakan pemikiran yang. *Jurnal Ilmiah Iqra’*, 15, 237–258.